



# Dukung Audit Dana Pilkada

## KPU-Wagub Dukung BPK

“Kita harap bukan hanya BPK ikut mengawasinya. Tapi termasuk anggota dewan dan masyarakat turut mengawasinya.”

**CHRISTIANDY SANJAYA**

Wakil Gubernur Kalbar

PONTIANAK, TRIBUN - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalbar Umi Rikdya-waty memperlakukan Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk melakukan audit anggaran pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten. Dukungan juga diberikan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya.

“Kami sih tidak memper-salahkan apabila BPK mau mengaudit anggaran pilkada,” kata Umi saat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 7 Kabupaten di Hotel Kapuas Palace, belum lama ini. Umi menyatakan mekanisme konstitusional memang sudah seperti itu, setelah pelaksanaan pemilu anggaran pasti di audit oleh BPK. Sepanjang anggarannya, digunakan sesuai prosedur dan

peraturan bagi kami tidak ada masalah,” ucapnya.

Mengenai anggaran pilkada di tujuh kabupaten di Kalbar teranggarkan dalam APBD. “Memang masih ada beberapa kabupaten, yang anggaran masih akan dipenuhi dalam APBD Perubahan,” kata Umi.

Dalam hal ini KPU Kalbar akan meminta KPU di tujuh kabupaten yang menggelar pilkada untuk melaporkan penganggarannya dua kali seperti, anggaran dari APBD mumi dan APBD perubahan.

“Artinya dana mereka diterima dari APBD mumi, akan habis pekerjaan di bulan berapa. Sehingga ketika habis di bulan itu, sekiranya itu juga penda bisa melakukan transfer anggaran untuk tahapan berikutnya,” jelasnya.

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya juga tidak mempermasalahkan, anggaran pilkada dilakukan anggaran pilkada. Karena memang harus diaudit sebab dana itu dianggarkan lewat APBD.

“Dana yang dipakai ini adalah anggaran dari negara. Maka memang harus diaudit karena mekanisme juga sudah seperti itu. Sehingga wajar saja apabila BPK melakukan audit terhadap anggaran pilkada,” ucapnya.

Menurutnya, semua anggaran yang dikeluarkan oleh negara, memang wajib diaudit oleh BPK. Supaya diawasi dengan baik, dalam pengunaannya. Agar tidak ada terjadi penyalahgunaan anggaran tersebut. “Kita harap bukan hanya BPK ikut mengawasinya. Tapi termasuk anggota dewan dan masyarakat turut mengawasinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar, saat dikonfirmasi terkait wacana tersebut, belum bersedia berkomentar. “Saya belum mau berbicara masalah audit dana pilkada itu. Karena ada yang bertanggungjawab di BPK,” ungkapnya dengan singkat kepada wartawan, usai menghadiri Rapat Isht-mewa DPRD dalam penyampaian LHP BPK RI kepada DPRD Kalbar, di Kantor DPRD Provinsi Kalbar, beberapa waktu lalu. (ml)